



**PELATIHAN TEKNIS  
PIMPINAN PELAKSANA BPS PROVINSI  
DALAM RANGKA SENSUS PERTANIAN 2003  
JAKARTA, 22 - 24 MEI 2003**



---

4200

**EVALUASI KEGIATAN YANG LALU DAN SEKARANG,  
SERTA RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DATANG**

**Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat**

## EVALUASI HASIL SUSENAS 2003

### SISTEM PENGOLAHAN

1. Program pengolahan Susenas 2003 dibuat dengan bahasa program CS-Pro versi 2.2.039 yang berjalan dalam lingkungan windows. Ini merupakan kali pertama Susenas menggunakan aplikasi CSPro untuk system pengolahan.
2. Sebelum melakukan entri petugas harus melakukan instalasi program dan jika daerah menerima program revisi, maka program lama harus diinstal terlebih dahulu.

### PERMASALAHAN

1. Data hasil entri seluruhnya direvalidasi di BPS Pusat, dan apabila didapati data yang tidak lengkap, maka data tersebut di-*delete* (dianggap gagal), sehingga daerah diminta untuk mengentry ulang hanya pada dokumen itu saja. Kasus tersebut pada umumnya terjadi karena mengentry dengan sistem yang lama (lampiran gambar/ lampiran 1). Untuk kasus tersebut daerah diminta menginstall program yang baru yang telah dikirimkan ke seluruh BPS Propinsi, atau daerah dapat men-*download* dari [susenas2003@yahoo.com](mailto:susenas2003@yahoo.com).
2. Pengiriman dokumen via email ke alamat Direktorat Statistik Kesra beberapa kali gagal diterima. Daerah disarankan untuk mengirimkan ke beberapa alamat email yang sudah ada dalam buku pedoman yaitu [munawar@mailhost.bps.go.id](mailto:munawar@mailhost.bps.go.id) atau [aryago@mailhost.bps.go.id](mailto:aryago@mailhost.bps.go.id).

### REALISASI PENGOLAHAN SUSENAS 2003

Sampai dengan tanggal 12 Mei 2003, penerimaan dokumen Kor dan Modul Konsumsi Susenas Panel 2003 baru mencapai 91,98 persen, dimana propinsi-propinsi yang sudah menyelesaikan seluruh pengiriman dokumen (sudah 100 persen) adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dista Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Propinsi yang paling rendah pemasukan dokumen Kor dan pasangan Modul Konsumsi adalah Kalimantan Barat, yaitu baru 15,79 persen.

Persentase pemasukan dokumen MSBP per 12 Mei 2003 baru mencapai 89,38 persen, dimana baru 15 propinsi yang sudah menyelesaikan pengiriman dokumen secara lengkap (100%), yaitu: Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Babel, Jabar, Bali, NTB, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, dan Papua. Kalbar merupakan satu-satunya propinsi yang terendah mengirimkan dokumen MSBP (24,17).

Persentase pemasukan hasil entri kor di daerah per 12 Mei 2003 masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 78,02 persen. Baru 5 propinsi yang sudah mengirimkan hasil entri kor secara penuh yaitu Babel, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali.

## RENCANA SUSENAS 2004

### A. MATERI DAN KUESIONER SUSENAS 2004

Materi Susenas tahun 2004 meliputi:

- ❖ KOR: Daftar VSEN2004.K
- ❖ Modul Kesehatan dan Perumahan: Daftar VSEN2004.MKP
- ❖ Panel 10.000 rumah tangga dengan materi KOR dan Modul Konsumsi: Daftar VSEN2004.K dan VSEN2004.M

### B. JADWAL SUSENAS 2004

#### 1. Pelatihan Instruktur Nasional (Innas)

Pelatihan Innas rencananya akan diadakan di Hotel Lembah Nyiur - Puncak dalam 2 (dua) gelombang. Sehubungan dengan waktu puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang berada sekitar bulan Nopember 2003, maka waktu pelatihan Innas dibuat 2 alternatif, yaitu:

- a. Alternatif I:
  - Gelombang I: 15 - 20 September 2003
  - Gelombang II: 22 - 27 September 2003
- b. Alternatif II (bulan puasa):
  - Gelombang I: 6-11 Oktober 2003
  - Gelombang II: 13-18 Oktober 2003

#### 2. Pelatihan Petugas Daerah

Untuk pelatihan petugas pencacah dan pengawas yang akan diselenggarakan di masing-masing daerah, BPS telah membuat 3 alternatif waktu pelatihannya, yaitu:

- a. Alternatif I: 6 Oktober - 27 Oktober 2003
- b. Alternatif II: 27 Oktober - 15 Nopember 2003
- c. Alternatif III: 8 -23 Desember 2003

Dari ketiga alternatif yang ada, untuk alternatif II waktu pelaksanaan jatuh pada bulan puasa, sedangkan alternatif ketiga setelah lebaran dengan konsekwensi jadwal berakhirnya anggaran. Alternatif tersebut disajikan untuk didiskusikan bersama dengan mempertimbangkan kesibukan daerah, khususnya berkaitan dengan P4B dan ST 2003.

### 3. Pelaksanaan Lapangan

Secara umum pelaksanaan lapangan yang terdiri dari kegiatan pendaftaran rumah tangga (listing), pemilihan sampel rumah tangga, dan pencacahan rumah tangga akan dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2004, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pendaftaran rumah tangga: 1-31 Januari 2004
- b. Pemilihan sampel rumah tangga: 15 Januari-5 Februari 2004
- c. Pencacahan rumah tangga: 1-28 Februari 2004

### 4. Pengolahan Susenas

Pengolahan Susenas KOR akan dilakukan dimasing-masing propinsi dan kabupaten/kota sekitar awal Maret 2004. Sistem data entry yang digunakan pada tahun 2004 sama dengan Susenas tahun 2003 yaitu CS-Pro versi 2.2.039, maka tidak akan dilakukan pelatihan. Program data entry serta soft copy manualnya akan dikirimkan pada bulan Februari 2004 via pos serta dapat di-download pada [Susenas2003@yahoo.com](mailto:Susenas2003@yahoo.com) dengan password SSN2004.

### 5. Pengiriman Dokumen ke BPS

Dokumen atau daftar yang akan dikirim kembali ke BPS adalah Daftar VSEN2004.MKP, Daftar VSEN2004.K untuk panel, Daftar VSEN2004.M, Daftar VSEN2004.DSRT, dan daftar DSBS. Tiga dokumen/daftar pertama dikirim ke Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sedangkan dua daftar terakhir dikirim ke Direktorat Metodologi Statistik. Pengiriman tersebut dilakukan sekitar Maret 2004.

### 6. Pengiriman hasil Entry Data Kor Ke BPS

Pengiriman hasil Entry Data Kor Ke BPS dapat dilakukan melalui e-mail dengan alamat:

[aryago@mailhost.bps.go.id](mailto:aryago@mailhost.bps.go.id) atau [munawar@mailhost.bps.go.id](mailto:munawar@mailhost.bps.go.id).

Pengiriman tersebut dilakukan sekitar April 2004. Mengingat seringnya attachment file (yang berbentuk bagi data-data ASCII) email rusak ketika dikirim, maka daerah diminta untuk melakukan proses zip file terlebih dahulu, sebelum data dikirim.

# **RENCANA**

## **KEGIATAN SURVEI GARAM YODIUM (SGY) 2003**

### **Pendahuluan**

Seperti tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2003 ini BPS kembali mendapat kepercayaan Departemen Kesehatan khususnya IP-GAKY untuk melaksanakan Survei Garam Yodium (SGY) 2003. Kegiatan ini didukung pendanaannya dari bantuan Bank Dunia. Pelaksanaan SGY 2003 kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya pelaksanaan lapangan SGY bersamaan dengan kegiatan Susenas, namun karena pelaksanaan lapangan Susenas 2003 telah selesai, maka SGY 2003 ini pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan listing Sensus Pertanian 2003. Secara umum terdapat tiga (3) materi yang tercakup dalam SGY 2003 yaitu:

- (i) pengumpulan data konsumsi garam yodium rumah tangga
- (ii) pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) wanita usia 15-49 tahun
- (iii) penimbangan balita (anak usia 0-59 bulan)

Secara lengkapnya rincian tahapan kegiatan pelaksanaan SGY 2003 adalah sebagai berikut:

### **I. Perencanaan**

#### **1. Rapat Persiapan**

Kegiatan ini dilaksanakan di BPS pusat pada bulan Maret dan April 2003. Rapat dihadiri pihak yang terkait dari BPS dan sekretariat IP-GAKY. Dari hasil rapat persiapan, telah diputuskan oleh pimpinan BPS untuk kegiatan SGY 2003 diintegrasikan ke dalam kegiatan Sensus Pertanian (ST) 2003.

Dengan mengikuti jadwal ST, Workshop Intama dilaksanakan di Cisarua pada tanggal 5-9 Mei 2003. Dalam kegiatan ini ditambahkan satu sesi khusus membahas maksud dan tujuan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap daftar agar didapat persamaan persepsi dan pemahaman oleh setiap Intama.

#### **2. Jenis Dokumen**

Dokumen pelaksanaan SGY 2003 terdiri dari:

- a. Daftar VSEN2003.GY: Kuesioner pencacahan rumah tangga terpilih SGY
- b. Daftar VSEN2003.PB: Kuesioner penimbangan balita
- c. Daftar VSEN2003.LILA: Kuesioner pengukuran LILA wanita 15-49 tahun
- d. Daftar VSEN2003.RBW: Kuesioner rekapitulasi jumlah balita dan wanita 15-49 th
- e. Buku pedoman pencacahan Survei Garam Yodium 2003

f. **Tester dan Alat ukur LILA**

Tester (Iodina Test) adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan kadar kandungan yodium dalam garam yang dikonsumsi rumah tangga. Tester yang digunakan dibuat/disediakan oleh PT. Indofarma. Perlu diperhatikan agar tester yang digunakan adalah tester yang baru dikirim, **jangan menggunakan tester yang lama** (tester yang digunakan pada SGY tahun 2002) karena dikhawatirkan sudah kadaluarsa.

### **3. Pengiriman Dokumen**

a. **Pengiriman dokumen ke daerah**

Dokumen untuk pelaksanaan SGY 2003 dikirim ke daerah pada bulan Mei 2003. Daftar GY, PB, LILA, RBW, buku pedoman dan alat ukur LILA dikirim BPS pusat. Tester dikirim langsung oleh PT. Indofarma. Semua dokumen dikirimkan ke BPS propinsi seluruh Indonesia. BPS propinsi bertanggung jawab untuk mendistribusikan semua dokumen tersebut sampai tingkat kabupaten/kota.

b. **Pengiriman dokumen ke BPS pusat**

Sehubungan dengan ketatnya waktu pelaksanaan SGY tahun ini, maka pengiriman dokumen hasil pencacahan diminta dikirimkan secara bertahap dan diharapkan sudah terkirim semua selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2003.

Dokumen hasil pencacahan dikirimkan tersendiri (tidak digabung dokumen lain), dan langsung dikirimkan ke BPS pusat up. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

## **II. Pelatihan dan Pelaksanaan Lapangan**

Kegiatan pelatihan sebagian besar dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan Sensus Pertanian.

### **1. Pelatihan Innas**

Pelatihan Innas dijadwalkan bersamaan dengan pelatihan innas ST pada tgl 20-31 Mei 2003. Jumlah Innas yang akan dilatih sebanyak 120 orang. Pada pelatihan ini disediakan satu sesi khusus untuk membahas materi SGY. Innas yang sudah dilatih bertanggung jawab melatih petugas SGY pada saat pelatihan Inda ST.

### **2. Petugas SGY**

Jumlah petugas yang akan dilatih (lihat Lampiran 2-5). Petugas SGY terdiri dari KSK (mantis), staf BPS Kab/Kota dan mitra, sedangkan penanggung jawab teknis di kabupaten/kota adalah Kasi Statistik Sosial (jumlah kab/kota Susenas 2003 adalah 341) .

Karena semua KSK akan mengikuti pelatihan Inda ST, maka pelatihan petugas SGY untuk KSK (sejumlah 4.922 orang) dilaksanakan pada saat pelatihan Inda ST pada tanggal 16-30 Juni 2003. Sebagai penanggungjawab teknis SGY, maka Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota hendaknya menjadi Inda (mengikuti pelatihan Inda ST03). Pada pelatihan tersebut akan disediakan satu sesi khusus untuk membahas materi SGY. Selanjutnya Inda ST, baik KSK maupun Kasi Stat. Sosial bertanggung jawab untuk melatih petugas SGY lainnya (mitra) pada saat pelatihan petugas ST.

Petugas SGY mitra yang menjadi petugas ST dilatih pada saat pelatihan petugas ST tanggal 15-31 Juli 2003. Pada pelatihan tersebut akan disediakan satu sesi khusus untuk membahas materi SGY. Diusahakan petugas tersebut adalah petugas Susenas 2003 yang akan bertugas pada blok sensus yang sama.

### 3. Penyalinan informasi dan jumlah rekapitulasi balita dan wanita 15-49 tahun

Penyalinan informasi keterangan balita dan wanita usia 15-49 tahun (WUS) dari daftar VSEN2003.K ke dalam Daftar VSEN2003.PB dan VSEN2003.LILA serta rekapitulasi jumlahnya (pengisian Daftar VSEN2003.RBW) dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lapangan.

Penyalinan informasi dilakukan karena ada beberapa isian Daftar PB dan LILA yang harus disalin dari Daftar Kor. Rekapitulasi dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah balita dan WUS tiap blok sensus. Daftar hasil rekapitulasi digunakan petugas pencacah untuk mengetahui alamat rumah tangga-rumah tangga terpilih Susenas 2003, serta perkiraan jumlah WUS dan balita.

Pada blok sensus kor+modul dimana proses entry data kor dilakukan di BPS propinsi maka yang bertugas melakukan penyalinan informasi dan rekapitulasi adalah staf bidang Statistik Sosial BPS propinsi. Pada blok sensus kor dimana proses entry data kor dilakukan di BPS kabupaten/kota maka yang bertugas melakukan penyalinan informasi dan rekapitulasi adalah staf Seksi Statistik Sosial BPS kabupaten/kota.

### 4. Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan lapangan SGY oleh KSK (Inda yang ditunjuk) sudah bisa dilaksanakan langsung setelah mereka mendapat materi SGY pada saat pelatihan Inda, sedangkan pelaksanaan lapangan oleh mitra statistik dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan listing ST pada bulan Agustus 2003. Mekanisme pelaksanaan lapangan SGY adalah sebagai berikut:

Dengan berpedoman Daftar VSEN2003.RBW pada saat mendatangi rumah tangga yang sama dengan daftar tersebut petugas sekaligus memberikan pertanyaan untuk mengisi Daftar VSEN2003.GY dan melakukan pengetesan garam yang dikonsumsi



rt tersebut. Apabila di rumah tangga terpilih ada WUS, maka dilakukan pengukuran LILAnya dan diisikan pada Daftar VSEN2003.LILA. Penimbangan balita harus dilakukan bersama dengan petugas Puskesmas/bidan desa setempat. Petugas terlebih dahulu membuat perjanjian dengan petugas puskesmas/bidan desa kapan bisa melakukan penimbangan. Pada saat ditemui ada balita pada rt yang sama dengan daftar RBW berikan jadwal kapan dan dimana akan dilakukan penimbangan balita tersebut. Untuk kegiatan penimbangan balita disediakan transportasi untuk dua orang petugas yaitu satu petugas pencacah (BPS) dan satu petugas puskesmas/bidan desa yang ditunjuk.

#### **5. Supervisi Teknis Pusat**

Pada saat pelaksanaan lapangan beberapa pejabat BPS pusat akan melakukan monitoring ke lapangan langsung untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi dan memberikan solusi/masukan pemecahannya.

#### **6. Supervisi Administrasi Pusat**

Untuk menghindari keterlambatan pembayaran terutama untuk para petugas lapangan, beberapa pejabat dari Dirjen Anggaran akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau perkembangan kegiatan.

#### **7. Supervisi Teknis Propinsi**

Pada saat pelaksanaan lapangan beberapa pejabat BPS propinsi akan melakukan monitoring ke lapangan langsung untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi dan memberikan solusi/masukan pemecahannya.

#### **8. Pengelolaan dokumen**

Pengelolaan dokumen meliputi kegiatan pendistribusian dokumen dari BPS propinsi ke BPS kab/kota dan dari BPS kab/kota kepada para petugas lapangan serta pengecekan dan pengiriman kembali dokumen yang sudah terisi dari BPS kab/kota ke BPS propinsi dan seterusnya.

### **III. Pengolahan Data dan Analisa**

#### **1. Batching, editing dan data entry**

Seluruh proses kegiatan ini dilakukan di BPS pusat, dan dijadwalkan sudah bias dilaksanakan mulai bulan Agustus 2003. Kegiatan ini direncanakan selama dua bulan dan selesai bulan September 2003.

#### **2. Evaluasi Hasil dan Pembuatan Laporan**

Seluruh kegiatan SGY 2003 harus sudah selesai pada pertengahan Desember 2003, ditandai dengan penyetoran laporan hasil SGY 2003 kepada Depsos/Bank Dunia. Dengan jadwal yang sangat pendek tersebut, maka pada bulan Oktober tabulasi hasil

data entry diharapkan sudah tersedia, dan laporan sudah bisa selesai pada bulan Nopember untuk diserahkan kepada Sekretariat IP-GAKY sebagai pertanggungjawaban kegiatan SGY 2003.

# **TRUST FUND STATISTICAL CAPACITY BUILDING (TFSCB) - BANK DUNIA**

## **1. Latar Belakang**

Undang-Undang (U.U.) nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah memberikan wewenang dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah (Pemda) lebih mengetahui dan memahami kondisi, situasi, potensi, dan kebutuhan spesifik daerahnya maka perencanaan pembangunan daerah oleh Pemda diharapkan akan lebih tepat sasaran. Dalam mendukung proses otonomi/desentralisasi ini pemerintah pusat telah meminta Pemda untuk menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda)-nya masing-masing sebagai pijakan umum bagi pembangunan daerah.

Perencanaan yang baik memerlukan dukungan data statistik yang terpercaya sehingga tingkat pencapaian program dapat dimonitor dan dievaluasi. Mempertimbangkan bahwa proses desentralisasi masih dalam tahap awal maka kemampuan banyak Pemda dalam memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam merencanakan dan mengambil kebijakan diperkirakan masih sangat terbatas. Mengantisipasi hal tersebut maka Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan proposal ke Bank Dunia, dan memperoleh grant/hibah melalui skema "*Trust Fund Statistical Capacity Building*" (TFSCB).

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah suatu paket training-workshop dan seminar, untuk meningkatkan kemampuan pejabat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan dan penentuan kebijakan daerahnya. Mempertimbangkan bahwa BPS kabupaten/kota sebagai sumber utama penyedia (produsen) data statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pengguna (konsumen) utama, maka peserta training-workshop dan seminar direncanakan akan ditujukan untuk pejabat kabupaten/kota dari kedua instansi tersebut di atas. Kegiatan ini direncanakan akan mencakup 120 kabupaten/kota terpilih dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2003 dan 2004.

Untuk menentukan dan menyusun materi training-workshop yang lebih tepat sasaran maka akan dilakukan beberapa kegiatan pendahuluan, satu diantaranya adalah "needs assessment" seminar dengan mengundang peserta dari sejumlah kabupaten/kota terpilih, yang diharapkan akan memberikan masukan berharga bagi penyusunan materi training-workshop.

## 2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan needs assessment seminar adalah mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan indikator yang relevan bagi perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Masukan-masukan dari seminar, yang akan dipadukan dengan ketersediaan data dari sumber BPS, akan merupakan referensi untuk penyusunan materi training-workshop yang akan diselenggarakan kemudian.

## 3. Tempat, Waktu, dan Peserta

Seminar akan dilaksanakan di Jakarta selama 1 hari penuh sekitar akhir bulan Mei/awal Juni 2003. Seminar direncanakan diikuti oleh 40 orang peserta (termasuk penyelenggara). Peserta dari kabupaten/kota adalah seperti terlampir, sedangkan peserta dari pusat adalah pejabat terkait dari BPS, Bappenas, Depdagri, Bank Dunia, Depkes, Depdiknas, Menko Kesra, Menko Ekuin, dan perwakilan lembaga internasional lainnya.

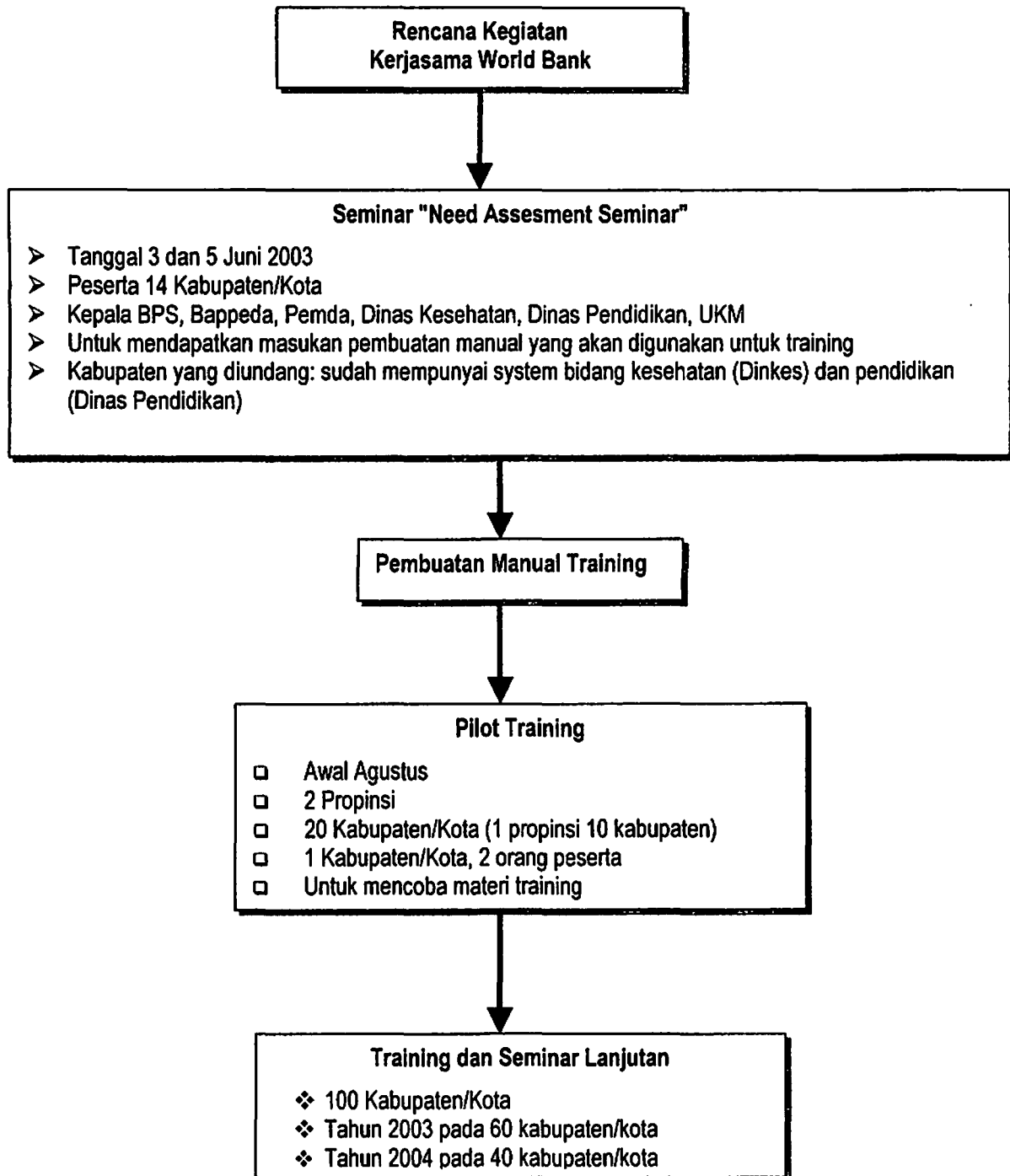
## 4. Kabupaten/Kota dan Propinsi yang Diundang

Kabupaten/Kota dan propinsi yang diundang pada *"Needs Assesment Seminar"*:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kabupaten Cianjur      | 9. Kota Surakarta                 |
| 2. Kota Sukabumi          | 10. Kabupaten Blitar              |
| 3. Kabupaten Kendal       | 11. Kabupaten Tabalong            |
| 4. Kota Yogyakarta        | 12. Kabupaten Solok               |
| 5. Kabupaten Kediri       | 13. Kota Binjai                   |
| 6. Kabupaten Mamuju       | 14. Kabupaten Kota Waringin Timur |
| 7. Kota Metro             | 15. Propinsi Jambi                |
| 8. Kabupaten Lombok Barat | 16. Propinsi Sulawesi Selatan     |

Dengan peserta sebagai berikut:

1. Kepala BPS (semua Kab/Kota & Propinsi)
2. Pemda (beberapa Kab/Kota)
3. Bappeda (beberapa Kab/Kota)
4. DPRD (beberapa Kab/Kota)
5. Dinas Kesehatan (beberapa Kab/Kota)
6. Dinas Pendidikan (beberapa Kab/Kota)
7. UKM (beberapa Kab/Kota)



## **SURVEI WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2002**

Tiga propinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua) hingga tanggal 1 Mei 2003 masih belum melengkapi administrasi Wianus 2002 tahap I (biaya pencacahan, pengawasan dan penyalinan DSRT) sehingga biaya Koordinator tingkat I dan II belum bisa dikirim.

Dimohon bagi propinsi yang belum menyelesaikan administrasi tahap II (biaya koordinator tingkat I dan II) segera mengirimkan bukti penggunaannya ke Direktorat Kesra up. Subdit. Stat. Pendidikan dan Kesos. Propinsi yang belum menyelesaikan administrasi tahap II: Sumsel, Jateng, Jatim, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel dan Papua.

## **MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2004**

Pada tahun 2004 Susenas akan mengumpulkan Modul Kesehatan dan Perumahan. Untuk itu persiapan sudah dilakukan antara lain mengundang instansi terkait untuk mendiskusikan muatan (variabel) yang akan dikumpulkan. Dari Departemen Kesehatan diberitakan ada kemungkinan mengumpulkan Modul Kesehatan seperti Kor, yaitu jumlah sampelnya sama dengan Kor sehingga bisa menghasilkan estimasi kabupaten/kota.

## **INDIKATOR DATABASE - UNFPA**

Sebagai tindak lanjut kerjasama dengan UNFPA, dilakukan kegiatan di empat propinsi berupa indikator data base di tingkat kabupaten/kota (Sumsel, Kalbar, Jabar, dan NTT). Kegiatan proyek tersebut berlangsung selama 5 tahun, dari 2001-2005 dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan kabupaten terpilih. Secara garis besar kegiatannya meliputi 4 bentuk :

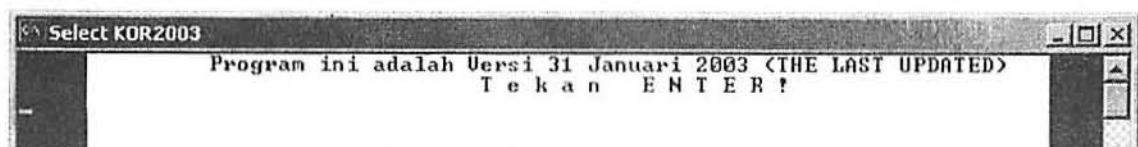
1. Pembentukan organisasi data base termasuk pengadaan komputer, rekrutmen dan pelatihan staf yang terkait dalam kegiatan data base.

2. Pengumpulan data dari berbagai sumber.
3. Mengolah dan menyimpan data dalam komputer data baru.
4. Memberikan informasi kepada para pemakai data dan cara mendapatkannya.

Untuk tahun 2003 kegiatan akan dimulai dengan sosialisai dan pelatihan petugas pengumpul data, direncanakan minggu ke tiga bulan Mei.

**Kabupaten/kota yang menjadi basis kegiatan:**

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Sumatera Selatan    | : | Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Kota Palembang, Ogan Komering Ulu, Lahat, Musi Rawas.              |
| Kalimantan Barat    | : | Sambas, Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Bengkayang, Singkawang, Kapuas Hulu.           |
| Nusa Tenggara Timur | : | Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Timur, Alor, Flores Timur, Lambata.                              |
| Jawa Barat          | : | Kab. Cirebon, Kuningan, Indramayu, Kota Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka, Garut, Purwakarta, Kab. Bandung. |



Tampilan Awal

BADAN PUSAT STATISTIK  
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2003

<<<<<<<< MENU UTAMA DATA ENTRY >>>>>>>>>

VSEN2003

©copyright:  
Direktorat Statistik  
Kesejahteraan Rakyat  
Subdirat Statistik RT  
Gedung 5, Lantai 6

email: ssn2003@yahoo.com, telephone: 021-3863681

A. COPY MASTER	F. BACKUP DATA
B. KODE BARU	G. LIST DHSAMPEL
C. ENTRY DATA	H. GABUNG DATA
D. SISIP MASTER	I. EXPORT DATA
E. UPDATE DATA	J. TABULASI
R. REKAP HASIL ENTRI	U. REVALIDASI
Z. KELUAR	

PILIH SALAH SATU KODE (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,R,U atau Z)

Tampilan Setelah Mengisi Kode Nama File

Versi: 31 Januari 2003 (Revised of Final Program) SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2003

**Rahasia** VSEN2003.K

**I. PENGENALAN TEMPAT**

1. Propinsi	<input type="text"/>
2. Kabupaten/kotamadya	<input type="text"/>
3. Kecamatan	<input type="text"/>
4. Desa/kelurahan	<input type="text"/>
5. Klasifikasi desa/kelurahan	<input type="text"/>
6. Nomor blok sensus	<input type="text"/>
7. Nomor kode sampel	<input type="text"/>
8. Nomor urut sampel rumah tangga	<input type="text"/>

**II. KETERANGAN RUMAH TANGGA**

1. Nama krt <input type="text"/>	4. Banyaknya anak usia 0-4 tahun <input type="text"/>
2. Suku bangsa krt : <input type="text"/>	5. Banyaknya art meninggal setahun yg lalu <input type="text"/>
3. Banyaknya anggota rumah tangga: <input type="text"/>	6. Banyaknya art yg lahir setahun yg lalu <input type="text"/>

**III. KETERANGAN PENCACAHAN**

1. Nama dan NIP Pencacah <input type="text"/>	5. Nama dan NIP Pengawas <input type="text"/>
---	---

Tampilan Blok I: Perhatikan tulisan Versi: 31 Januari 2003 (Revised of Final Program)



**Tabel 1.**  
**Matrik Realisasi Pembiayaan Survei Garam Yodium 2003**  
**(000 Rp)**

No.	Propinsi	Kabupaten	Blok Sensus		Jumlah petugas	Jumlah yg	Jumlah l
		(koord. kab)	Kor	Kor+Modul		dilatih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	13	266	126	259	272	16.320
2	Sumatera Utara	19	636	184	502	521	31.260
3	Sumatera Barat	15	428	112	326	341	20.460
4	R i a u	15	488	104	348	363	21.780
5	J a m b i	10	308	72	226	236	14.160
6	Sumatera Selatan	7	198	114	213	220	13.200
7	Bengkulu	4	88	64	108	112	6.720
8	Lampung	10	302	136	287	297	17.820
9	Bangka Belitung	3	66	50	83	86	5.160
10	DKI Jakarta	5	188	192	286	291	17.460
11	Jawa Barat	22	682	450	791	813	48.780
12	Jawa Tengah	35	1106	472	1.025	1.060	63.600
13	Dista Yogyakarta	5	72	144	180	185	11.100
14	Jawa Timur	37	1262	552	1.183	1.220	73.200
15	Banten	6	184	120	212	218	13.080
16	B a l i	9	238	120	239	248	14.880
17	Nusa Tenggara Barat	7	146	136	209	216	12.960
18	Nusa Tenggara Timur	14	420	112	322	336	20.160
19	Kalimantan Barat	9	222	120	231	240	14.400
20	Kalimantan Tengah	6	158	72	151	157	9.420
21	Kalimantan Selatan	11	306	112	265	276	16.560
22	Kalimantan Timur	12	364	72	254	266	15.960
23	Sulawesi Utara	5	126	72	135	140	8.400
24	Sulawesi Tengah	8	240	72	192	200	12.000
25	Sulawesi Selatan	24	814	144	551	575	34.500
26	Sulawesi Tenggara	5	160	72	152	157	9.420
27	Gorontalo	3	76	50	88	91	5.460
28	M a l u k u	5	74	50	87	92	5.520
29	Maluku Utara	3	48	32	56	59	3.540
30	Papua	14	366	160	343	357	21.420
<b>TOTAL</b>		<b>341</b>	<b>10.032</b>	<b>4.288</b>	<b>9.304</b>	<b>9.645</b>	<b>578.700</b>

**Tabel 2.**  
**Matrik Realisasi Pembiayaan Survei Garam Yodium 2003**  
**(000 Rp)**

No.	Propinsi	Blok Sensus		Pencacahan rt SGY	Penyalinan Informasi		Jumlah II
		Kor	Kor+Modul		PB	PB+LILA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	266	126	12.544	798	630	13.972
2	Sumatera Utara	636	184	26.240	1.908	920	29.068
3	Sumatera Barat	428	112	17.280	1.284	560	19.124
4	Riau	488	104	18.944	1.464	520	20.928
5	Jambi	308	72	12.160	924	360	13.444
6	Sumatera Selatan	198	114	9.984	594	570	11.148
7	Bengkulu	88	64	4.864	264	320	5.448
8	Lampung	302	136	14.016	906	680	15.602
9	Bangka Belitung	66	50	3.712	198	250	4.160
10	DKI Jakarta	188	192	12.160	564	960	13.684
11	Jawa Barat	682	450	36.224	2.046	2.250	40.520
12	Jawa Tengah	1.106	472	50.496	3.318	2.360	56.174
13	Distrik Yogyakarta	72	144	6.912	216	720	7.848
14	Jawa Timur	1.262	552	58.048	3.786	2.760	64.594
15	Banten	184	120	9.728	552	600	10.880
16	Bali	238	120	11.456	714	600	12.770
17	Nusa Tenggara Barat	146	136	9.024	438	680	10.142
18	Nusa Tenggara Timur	420	112	17.024	1.260	560	18.844
19	Kalimantan Barat	222	120	10.944	666	600	12.210
20	Kalimantan Tengah	158	72	7.360	474	360	8.194
21	Kalimantan Selatan	306	112	13.376	918	560	14.854
22	Kalimantan Timur	364	72	13.952	1.092	360	15.404
23	Sulawesi Utara	126	72	6.336	378	360	7.074
24	Sulawesi Tengah	240	72	9.984	720	360	11.064
25	Sulawesi Selatan	814	144	30.656	2.442	720	33.818
26	Sulawesi Tenggara	160	72	7.424	480	360	8.264
27	Gorontalo	76	50	4.032	228	250	4.510
28	Maluku	74	50	3.968	222	250	4.440
29	Maluku Utara	48	32	2.560	144	160	2.864
30	Papua	366	160	16.832	1.098	800	18.730
<b>TOTAL</b>		<b>10.032</b>	<b>4.288</b>	<b>458.240</b>	<b>30.096</b>	<b>21.440</b>	<b>509.776</b>

**Tabel 3.**  
**Matrik Realisasi Pembiayaan Survei Garam Yodium 2003**  
**(000 Rp)**

No.	Propinsi	Rate Trans.	Pengukuran LILA *)	Penimb. Balita *)	Transpor Penimb. balita	Management of doc.		Jumlah III
						kab/kota	propinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	NAD	15	2.177	13.548	11.760	3.325	1.260	55.445
2	Sumatera Utara	15	3.180	28.339	24.600	7.950	1.840	114.272
3	Sumatera Barat	15	1.935	18.662	16.200	5.350	1.120	75.064
4	R i a u	20	1.797	20.460	23.680	6.100	1.040	87.817
5	J a m b i	15	1.244	13.133	11.400	3.850	720	52.685
6	Sumatera Selatan	15	1.970	10.783	9.360	2.475	1.140	44.430
7	Bengkulu	15	1.106	5.253	4.560	1.100	640	21.837
8	Lampung	15	2.350	15.137	13.140	3.775	1.360	61.854
9	Bangka Belitung	15	864	4.009	3.480	825	500	16.697
10	DKI Jakarta	10	3.318	13.133	7.600	2.350	1.920	51.439
11	Jawa Barat	10	7.776	39.122	22.640	8.525	4.500	150.599
12	Jawa Tengah	10	8.156	54.536	31.560	13.825	4.720	206.622
13	Dista Yogyakarta	10	2.488	7.465	4.320	900	1.440	29.992
14	Jawa Timur	10	9.539	62.692	36.280	15.775	5.520	237.722
15	Banten	10	2.074	10.506	6.080	2.300	1.200	40.445
16	B a l i	10	2.074	12.372	7.160	2.975	1.200	47.172
17	Nusa Tenggara Barat	15	2.350	9.746	8.460	1.825	1.360	40.872
18	Nusa Tenggara Timur	20	1.935	18.386	21.280	5.250	1.120	79.327
19	Kalimantan Barat	20	2.074	11.820	13.680	2.775	1.200	52.032
20	Kalimantan Tengah	20	1.244	7.949	9.200	1.975	720	34.821
21	Kalimantan Selatan	20	1.935	14.446	16.720	3.825	1.120	62.850
22	Kalimantan Timur	20	1.244	15.068	17.440	4.550	720	64.602
23	Sulawesi Utara	20	1.244	6.843	7.920	1.575	720	30.198
24	Sulawesi Tengah	20	1.244	10.783	12.480	3.000	720	46.679
25	Sulawesi Selatan	20	2.488	33.108	38.320	10.175	1.440	141.598
26	Sulawesi Tenggara	20	1.244	8.018	9.280	2.000	720	35.116
27	Gorontalo	20	864	4.355	5.040	950	500	19.326
28	M a l u k u	15	864	4.285	3.720	925	500	17.792
29	Maluku Utara	15	553	2.765	2.400	600	320	11.490
30	Papua	15	2.765	18.179	15.780	4.575	1.600	74.228
<b>TOTAL</b>		<b>470</b>	<b>74.097</b>	<b>494.899</b>	<b>415.540</b>	<b>125.400</b>	<b>42.880</b>	<b>2.005.023</b>

\*) Masih perkiraan akan dibayarkan sesuai jumlah WUS yang diukur LILA-nya dan balita yang ditimbang

**Tabel 4.**  
**Matrik Realisasi Pembiayaan Survei Garam Yodium 2003**  
**(000 Rp)**

No.	Propinsi	Kabupaten	Validasi		Koord. Kab/Kota	Koord. propinsi	Jumlah IV	Total l s.d IV
			Trans.	Perdlem				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dista Aceh	13	500	2.250	5.850	720	9.320	95.057
2	Sumatera Utara	19	500	2.250	8.550	720	12.020	186.620
3	Sumatera Barat	15	500	2.250	6.750	720	10.220	124.868
4	R i a u	15	500	2.250	6.750	720	10.220	140.745
5	J a m b i	10	500	2.250	4.500	720	7.970	88.259
6	Sumatera Selatan	7	500	2.250	3.150	720	6.620	75.398
7	Bengkulu	4	500	2.250	1.800	720	5.270	39.275
8	Lampung	10	500	2.250	4.500	720	7.970	103.246
9	Bangka Belitung	3	500	2.250	1.350	720	4.820	30.837
10	DKI Jakarta	5	500	2.250	2.250	720	5.720	88.303
11	Jawa Barat	22	500	2.250	9.900	720	13.370	253.269
12	Jawa Tengah	35	500	2.250	15.750	720	19.220	345.616
13	Dista Yogyakarta	5	500	2.250	2.250	720	5.720	54.660
14	Jawa Timur	37	500	2.250	16.650	720	20.120	395.636
15	Banten	6	500	2.250	2.700	720	6.170	70.575
16	B a l i	9	500	2.250	4.050	720	7.520	82.342
17	Nusa Tenggara Barat	7	500	2.250	3.150	720	6.620	70.594
18	Nusa Tenggara Timur	14	500	2.250	6.300	720	9.770	128.101
19	Kalimantan Barat	9	500	2.250	4.050	720	7.520	86.162
20	Kalimantan Tengah	6	500	2.250	2.700	720	6.170	58.605
21	Kalimantan Selatan	11	500	2.250	4.950	720	8.420	102.684
22	Kalimantan Timur	12	500	2.250	5.400	720	8.870	104.836
23	Sulawesi Utara	5	500	2.250	2.250	720	5.720	51.392
24	Sulawesi Tengah	8	500	2.250	3.600	720	7.070	76.813
25	Sulawesi Selatan	24	500	2.250	10.800	720	14.270	224.186
26	Sulawesi Tenggara	5	500	2.250	2.250	720	5.720	58.520
27	Gorontalo	3	500	2.250	1.350	720	4.820	34.116
28	M a l u k u	5	500	2.250	2.250	720	5.720	33.472
29	Maluku Utara	3	500	2.250	1.350	720	4.820	22.714
30	Papua	14	500	2.250	6.300	720	9.770	124.148
<b>TOTAL</b>		<b>341</b>	<b>15.000</b>	<b>67.500</b>	<b>153.450</b>	<b>21.600</b>	<b>257.550</b>	<b>3.351.049</b>

## PERMASALAHAN SUSENAS DI DAERAH

### I. Anggaran

- Keterlambatan Upah Pembayaran Susenas 2003,  
Pada dasarnya keterlambatan pembayaran biaya lapangan SUSENAS bukan dari BPS, tetapi dari Departemen Keuangan. Mudah-mudahan cairnya DIP tidak tertunda lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk sementara BPS daerah dimohon agar menyampaikan kondisi yang ada saat melakukan rekrutmen petugas, karena cairnya dana diluar kemampuan BPS.
- Biaya daerah sulit sangat terbatas  
Kalau memang dengan anggaran daerah sulit masih tidak cukup, bisa diminta penggantian/usulan tambahan di anggaran tahun berikutnya.
- Biaya pencacahan Susenas masih relatif rendah dibandingkan survei-survei lainnya.  
Peningkatan upah selalu diupayakan tetapi hasilnya tergantung ketersediaan dana dari pemerintah
- Rate pelatihan petugas Susenas sangat kecil.  
Penyelenggara pelatihan di daerah agar mengatur secara bijaksana sesuai ketersediaan dana.
- Setiap survei yang dilakukan selalu ada kegiatan penyalinan/pembuatan sketsa peta blok sensus untuk keperluan pencacahan.  
Akan diusulkan anggaran pengadaan blanko sketsa peta dan biaya penyalinan/pembuatan sketsa peta pada setiap survei
- Susenas merupakan kegiatan rutin BPS setiap tahun, pada saat ini terlihat kualitas isiannya cenderung semakin menurun Untuk mengantisipasi hal tersebut mohon agar penyusunan Petunjuk Operasional (OP) pada P2S dapat memasukkan rincian mata anggaran untuk Pengawas BPS Propinsi terhadap petugas lapangan  
Akan diusulkan untuk dimasukkan, realisasinya tergantung tersedianya anggaran BPS.

## II. Sampel

- Sampel terpilih Susenas dan Sakernas selalu berulang, sehingga responden jenuh.

Pemilihan sampel dilakukan independen antar tahun, mungkin beberapa diantaranya terpilih kembali.

- Apabila telah terjadi penggantian sampel karena daerah rawan/ sering konflik, mengapa untuk survei yang sama di tahun mendatang atau untuk survei lain selalu blok yang diganti tersebut terpilih kembali.

Diteruskan ke Dirat. Metodologi

- Jumlah Penduduk Sumatera Barat pada beberapa Kab/Kota mengalami penurunan yang cukup besar. Namun koreksi BPS daerah tidak pernah diperhatikan.

Perlu dibahas kembali bersama Direktur Stat. Kependudukan BPS

- Dalam pelaksanaan tentang UU Otonomi Daerah, dimana konsumen BPS sekarang adalah level Kabupaten/Kota atau Kecamatan. Hal ini BPS dituntut untuk memperluas cakupan sampel rumah tangga, sehingga data yang dihasilkan BPS dapat dimanfaatkan tidak hanya sampai level Kabupaten/Kota tetapi pada level Kecamatan

Penambahan sampel oleh daerah untuk berbagai kepentingan seperti data kemiskinan sangat didukung, hal ini tergantung usaha BPS Daerah ke Pemda

## III. Pengolahan

- Program pengolahan Susenas masih saja banyak kesalahan dan perbaikannya seringkali terlambat dikirim ke BPS Propinsi, sehingga banyak Kabupaten/ kota yang sudah selesai entry dengan program lama. Kemudian Rule validasi program entry Susenas kurang lengkap, sitem keamanannya sangat terbuka , sehingga operator dapat meng-up date rule validasi Penegasan dalam pelatihan seringkali tidak direspon dalam pembuatan program pengolahan

Diupayakan untuk menyempurnakan program pengolahan, walaupun uji coba telah dilakukan beberapa kali ternyata kesalahan tetap ada.

- Program pengolahan Susenas sering berubah meski petugas pengolah sudah dilatih.

Untuk Susenas 2003 hanya berubah 2 kali saja mungkin daerah masih banyak menggunakan yang lama.

#### IV. Data

- Ketersediaan Data clean / raw data susenas 2002 sangat terlambat dari BPS, biasanya setiap bulan Oktober tahun bersangkutan, sekarang bulan Pebruari tahun berikutnya.

Keterlambatan lebih disebabkan oleh ketersediaan faktor pengali.

Raw data dan tabel-tabel SUSENAS dan survei lainnya biasanya dikirimkan setelah tersedia bila belum menerima Kabid. Sosial agar memintanya . Daerah dimohon memberikan perhatian dengan data yang telah diberikan sehingga tidak perlu memintanya kembali di belakang hari.

BPS Pusat tidak melakukan tabulasi ulang dari yang telah dipublikasikan, bagi daerah yang membutuhkan seharusnya dapat membuat sendiri tabel-tabel pokok SUSENAS tahun-tahun sebelumnya.

Tabulasi final Susenas 2002 baik Kor maupun Modul Konsumsi akan diberikan pada waktu Ratek; data dari Diseminasi Stat., tabel dasar dari Dirat Stat. Kesra

- Beberapa jenis data yang dikeluarkan BPS belum/terlambat diterima BPS daerah seperti penduduk miskin dll. Ketika suatu instansi mengkonfirmasinya /membutuhkan data tersebut BPS daerah tidak siap

Sudah ada mekanisme penyampaiannya ke daerah; daerah agar membuat secara jelas aturan pendistribusiannya di daerah

#### V. Kuesioner

- Beberapa pertanyaan pada Susenas terlalu banyak dan kurang aplikatif untuk rumahtangga elit dan sibuk, sehingga sulit memperoleh data konsumsi yang sebenarnya. Kecenderungan yang terjadi adalah rumahtangga terpilih dialihkan

ke rumahtangga yang lebih sederhana sehingga gambaran pengeluaran selalu bias, distribusi pengeluaran tidak akurat. Kemudian pengisian KLUI dan KBLI Susenas sebaiknya jangan pencacah lagi, karena hasilnya sangat jelek.

Akan dikaji kembali, pengisian KLUI dan KBLI seharusnya dilakukan oleh petugas Editor sebelum entry data dilakukan.

#### **VI. Jadwal**

- Pelaksanaan Susenas 2003 yang dimulai pada awal tahun anggaran terasa sangat berat (Desember 2002/Januari 2003), karena anggaran belum tersedia. Apalagi untuk daerah-daerah sulit yang membutuhkan biaya sangat mahal ditambah lagi pada bulan-bulan tersebut masuk musim penghujan dan daerah kepulauan mengalami angin utara yang menyulitkan petugas.  
Perubahan jadwal pelaksanaan SUSENAS akan dikaji kembali.

- Banyak kegiatan survei/sensus yang dilaksanakan BPS bersamaan waktunya. Ada kegiatan pelatihan suatu survei/sensus yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan lapangan kegiatan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya pemasukan dokumen dari petugas ke BPS Kabupaten/Kota dan seterusnya.  
Sudah diupayakan dengan mengintegrasikan beberapa kegiatan, tetapi tidak seluruhnya dapat dilakukan.

#### **VII. Lain-lain**

- Keterbatasan SDM dalam menangani analisis dan penghitungan beberapa indikator pokok sosial dan kependudukan seperti IPM, IKM, IPJ dll. Juga masih banyak kendala di dalam pembuatan/ pengolahan data dengan program-program aplikasi seperti Fox Pro, Visual Data Base dsb.  
Sudah ada beberapa buku yang dapat dijadikan panduan, diantaranya yang digunakan dalam pelatihan pemanfaatan Data Susenas, kerjasama dengan UNFPA th 1999. Akan diusahakan pelatihan teknis SDM yang berkenaan dengan hal tersebut



Puslatikom BPS sudah melaksanakan pelatihan program-program aplikasi seperti Fox Pro, Visual Data Base dsb, mestinya staf yg mengikuti pelatihan diwajibkan memberikan pengetahuannya kepada yang lain.

- Kekurangan Dokumen-dokumen survey yang dikirim dari BPS Pusat dalam jumlah yang cukup besar. (Susenas 2002)

Selama ini dalam mengirimkan dokumen-dokumen BPS selalu melampirkan surat pengantar (bahkan sebelum dokumen dikirimkan), juga ada surat pengantar dari ekspedisi bersamaan dengan pengiriman dokumen. Jadi jika jumlahnya kurang mestinya daerah menginformasikan segera ke pusat ke bagian pengiriman dokumen.

- Kegiatan Modul Konsumsi dan Kor-Modul MSBP telah mencapai 100%. Namun entry data mengalami hambatan karena terdapat 2 kab/kota yang mengalami kerusakan komputer.

Mudah-mudahan komputer pengadaan P4B dapat membantu kekurangan komputer daerah.

### Matriks Permasalahan Daerah Deputi Bidang Sttaistik Sosial

No.	Provinsi	Permasalahan							
		Anggaran	Sampel	Pengolahan	Data	Kuesioner	Jadwal	SDM	Lain-lain
1	Nanggroe Aceh Darussalam		v						
2	Sumatera Utara	v	v	v		v			
3	Sumatera Barat		v		v	v			v
4	Riau	v					v	v	v
5	Jambi								
6	Sumatera Selatan								
7	Bengkulu						v		v
8	Lampung								
9	Kepulauan Bangka Belitung								
10	DKI Jakarta								
11	Jawa Barat	v		v			v		
12	Jawa Tengah	v	v						
13	DI Yogyakarta								
14	Jawa Timur	v		v	v				
15	Banten				v			v	
16	Bali	v			v				
17	Nusa Tenggara Barat	v	v		v				
18	Nusa Tenggara Timur								
19	Kalimantan Barat	v	v				v		
20	Kalimantan Tengah		v					v	v
21	Kalimantan Selatan	v		v			v		v
22	Kalimantan Timur		v						v
23	Sulawesi Utara	v	v						
24	Sulawesi Tengah	v			v				
25	Sulawesi Selatan	v	v		v				
26	Sulawesi Tenggara	v							v
27	Gorontalo				v				
28	Maluku								
29	Maluku Utara								
30	Papua		v		v				